Buletin Isen Mulang

Buletin Pemer[illegible] Kalimantan Tengah

Edisi, 293
Maret 2019

diterbitkan ; Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Susunan Dewan Redaksi Buletin Pemprov Kalteng "Isen Mulang"

Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Adminidtrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Penyaringan Informasi dan Publikasi pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Media dan Dokumentasi pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Staf Pelaksana :

Muliyani, S.Sos, Eka Supriyaningsih, Joko Prabowo, Nova Anggreni, Benito Zuares

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya
Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus
No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

Daftar Isi ;

PERINGATAN HUT DAMKAR, SATPOL PP DAN LINMAS 2019____3

Bimtek Penatausahaan Pertanahan Se-Kalimantan Tengah Tahun 2019____4

Plh.Sekda Kalteng : Pencapaian rioritas Pembangunan Nasional Perlu Optimalisasi Dukungan Daerah____4

Gub Kalteng : Kepala Desa Harus Mempedomani Aturan Dalam Pengelolaan Dana Desa_____5

Pemprov Kalteng Sampaikan LKPJ T.A 2018 Kepada DPRD Kalteng____6

Gub Kalteng : ASN Harus Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Tercela____7

Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I___7

Sekda Kalteng : Kabupaten dan Kota Wajib Memiliki Lembaga Kelitbangan____8

Sekda Kalteng : Pencapaian Target RPJMD Perlu Sinergitas Kabupaten/Kota dan Provinsi____9

Gub Kalteng : Guru Harus Mampu Membentuk Karakter Positif Dalam Diri Siswanya____10

Gelar Karya Kalteng 2019 Resmi Ditutup____11

Gub Kalteng Serahkan LKPD Unaudited TA 2018 Kepada BPK Kalteng____11

Kalteng Perlu Teknologi Alternatif Pengolahan Lahan Tanpa Bakar____12

Wagub Kalteng Buka Gelar Karya Kalteng 2019____13

Kalteng Februari 2019 Alami Deflasi 0,18 % ____14

Pemprov Kalteng Dukung Program BNF Untuk Konservasi Orangutan____15

Menteri KLH : Rimbawan Pantang Surut Menghadapi Tantangan___16

Pemprov Kalteng Kucurkan Program Kartu Kalteng Berkah (KKB)____17

Gub Kalteng : Kedudukan Masyarakat Adat Harus Ditempatkan Pada Posisi Yang Tepat____18

Gub Kalteng : Pembangunan Kependudukan dan KB Harus Melibatkan Semua Pihak____19

biropkp.kalteng.go.id sekretariat.daerah.kalteng @biropkp_kalteng
protokol komunikasi publik kalteng buletin.isenmulang@gmail.com

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Sub Bagian Informasi Pemerintahan Umum Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/Fax (0536) 4200241

PERINGATAN HUT DAMKAR, SATPOL PP DAN LINMAS 2019

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Peringatan Ulang Tahun Ke-100 Pemadam Kebakaran, POL PP Ke-69 dan HUT Ke-57 SAT LINMAS Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (28/03) dengan Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri.

Upacara tersebut diikuti sejumlah Bupati, perwakilan dari Pemadam Kebakaran, Pol PP dan Sat Linmas Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalteng serta perwakilan TNI/Polri, yang diakhiri dengan berbagai atraksi yang berkaitan pelaksanaan tugas Pemadaman Kebakaran dan Tugas Kepolisian Pamong Praja di lapangan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutan tertulis disampaikan Inspektur Upacara Fahrizal Fitri di hadapan peserta upacara menegaskan Peringatan Ulang Tahun bukan forum untuk mengenang masa lalu, tapi sebagai sarana meneruskan semangat juang, dedikasi dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat serta kebulatan tekad untuk terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

"Peringatan HUT Ke-100 Pemadam Kebakaran, HUT Ke-69 Sat Pol PP dan HUT Ke-57 Sat Linmas tahun 2019 ini saya mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi idiologi Pancasila menjadi sarana pemersatua bangsa. Selain itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat", tegas Tjahjo Kumolo.

Ditegaskan, Pemadam Kebakaran, Sat Pol PP dan Sat Linmas bukan hanya penjaga kota yang bertindak pasif, tapi berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan dan memberikan perlindungan masyarakat, termasuk aktif dalam menyukseskan agenda nasional bangsa Indonesia.

Disebutkan, Tugas Pemadam Kebakaran adalah melakukan pencegahan, pengendalian, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam kondisi yang membahayakan manusia. Kemudian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Demikian juga Satuan Perlindungan Masyarakat dibentuk dan disiapkan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, ikut serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu serta membantu upaya pertahanan negara.

"Oleh karena itu saya instruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Para Pemangku Kepentingan yang terkait agar melakukan penguatan penyelenggaraan kebakaran dan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum di daerah melalui langkah-langkah penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan kapasitas sumberdaya aparatur, penguatan kapasitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengalokasian anggaran yang memadai bagi pencapaian target standart pelayanan minimal dengan mempedomani Permendagri yang berkaitan dengan penyusunan RKPD dan APBD", jelas Mendagri.

Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintahan dan komponen bangsa wajib menyukseskan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. "Mari kita bersama-sama menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu ini agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, LUBER, Jurdil dan Bermartabat. Aparatur juga menjadi barisan terdepan dalam melawan racun demokrasi yaitu politik uang, politisasi SARA, penyebaran ujaran kebencian, fitnah dan hoax", jelas Tjahjo Kumolo.

Harus dipastikan agar semua pihak dan komponen bangsa ini mematuhi aturan dan berpolitik secara elegan sehingga proses demokrasi akan melahirkan pemimpin bangsa yang berkiblat kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.***

Bimtek Penatausahaan Pertanahan Se-Kalimantan Tengah Tahun 2019

Palangka Raya - Biro PKP. Penatausahaan pertanahan merupakan pedoman dalam penyelenggaraan/pelaksanaan bidang pertanahan, sehingga aparatur pemerintah harus benar-benar dapat memahami guna penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan sinergis.

Penatausahaan pertanahan yang kurang baik berakibat pada kurang baiknya pelayanan kepada masyarakat dan berdampak pada kurangnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh aparatur, demikian disampaikan oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Penatausahaan Pertanahan Se-Kalimantan Tengah Tahun 2019, Rabu (20/03) di Palangka Raya.

"Kami yakin, peningkatan kualitas aparatur perangkat daerah akan berbanding lurus dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di daerah Kabupaten/Kota yang secara keseluruhan akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan bagi masyarakat se-Kalimantan Tengah dan sejalan dengan program Bapak Gubernur menuju KALTENG BERKAH", ujar Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng.

Administrasi pertanahan merupakan suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Leonard S. Ampung mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman urusan penyelenggaraan bidang pertanahan bagi ASN di Pemerintah Provinsi, Kabupaten// Kota di Kalimantan Tengah untuk kita menyelenggarakan penatausahaan pertanahan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana kerja, perumusan kebijakan teknis pertanahan, inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan fasilitasi pendaftaran tanah yang berpedoman pada hukum pertanahan yang berlaku. "Semakin baik bentuk pengelolaan administrasi pertanahan oleh perangkat daerah bidang pertanahan akan berdampak pada semakin baik pula perencanaan dan pemanfaatan bagi pembangunan ke depan", kata Leonard S. Ampung.***

Plh.Sekda Kalteng : Pencapaian rioritas Pembangunan Nasional Perlu Optimalisasi Dukungan Daerah.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Rapat Koordinasi Teknis yang diselenggarakan secara berkala oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti Kepala Bappedalitbang Kabupaten dan Kota se-Kalteng serta Kepala SOPD tingkat provinsi terkait, bertujuan memantapkan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dan Daerah tahun 2020. Selain itu melakukan Penyelarasan Pusat dan Daerah serta Kabupaten dan Kota dalam rangka memaksimalkan dan mencapai target kualitas pembangtunan nasional tahun 2020.

Kepala Bappedalitbang Kalteng Yuren. S. Bahat menjelaskan hingga saat ini masih terdapat usulan dari daerah yang tidak sesuai dengan kewenangan. Disebutkan, jumlah usulan Provinsi, Kabupaten dan Kota berdasarkan aplikasi KRISNA SELARAS Per 13 Maret 2019 tercatat 3.156 usulan dengan program terbanyak dari Kementerian PUPR yakni 798 usulan.

Sementara itu Plh. Sekda Kalteng Sapto Nugroho dalam pengarahannya mengungkapkan sesuai rancangan RKP tahun 2020 dengan tema "Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas", terdapat 5 (lima) Prioritas Nasional dalam Tahun Anggaran 2020.

Ke-5 prioritas itu meliputi Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, Ketahanan Pangan, Air, Energy dan Lingkungan Hidup serta Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

"Langkah-langkah daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional tersebut antara lain optimalisasi dukungan daerah dalam pelaksanaan pembangunan terutama infrastruktur dan pariwisata, pendataan penerima manfaat dan lokus kegiatan yang aktual dan faktual, koordinasi yang intens antara pusat dan daerah, optimalisasi potensi unggulan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta peningkatan kapasitas aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel", jelas Sapto Nugroho pada Rakortek Bappedalitabang se-Kalteng di Palangka Raya, Senin (25/03/2019)..

Sapto Nugroho menekankan untuk mencapai prioritas tersebut perlu adanya komunikasi yang aktif dan efektif antara pemangku kepentingan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam memahami substansi dan output dari Rakortek tersebut.

"Selain itu menyiapkan data strategis sebagai bagian dari proses diskusi tahun 2020, memahami rangkaian regulasi yang mengikat para pemangku kepentingan, menindaklanjuti hasil Rakortek dan menginput perbaikan usulan dalam aplikasi KRISNA SELARAS RKP 2020 sebagai bahan masukan Musrenbang Provinsi dan Nasional", terang Sapto Nugroho.***

Gub Kalteng : Kepala Desa Harus Mempedomani Aturan Dalam Pengelolaan Dana Desa

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pembangunan desa merupakan agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019 poin ketiga. Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2019 dialokasikan dana desa Rp. 70 triliun yang disalurkan kepada 74.910 desa di seluruh Indonesia. Kalimantan Tengah tahun 2019 menerima dana desa Rp. 1,347 triliun yang disalurkan kepada 1.433 desa yang tersebar di 13 kabupaten.

"Mengingat besarnya alokasi anggaran dana desa tersebut tentunya memerlukan pengawasan dan pengawalan yang lebih intensif dari pihak – pihak terkait, sehingga dapat memberikan keyakinan yang lebih memadai bahwa dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan", ungkap Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulis disampaikan Plh. Sekda Kalteng Sapto Nugroho Handono Wareh ketika membuka Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa se-Kalteng 2019 di Palangka Raya, Rabu (13/03).

Pengawasan dan pengawalan yang intensif terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa itu menurut gubernur dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa sehingga pengelolaan dana desa tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. "Untuk mendukung fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut diperlukan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan desa mengingat alokasi anggaran yang dikelola pemerintah desa meningkat terus tiap tahunnya", tegas Gubernur Kalteng.

Diungkapkan, tahun 2018 masih terdapat beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah yang mengalami keterlambatan penyaluran dana desa. Hal ini disebabkan belum siapnya beberapa desa dalam memenuhi persyaratan sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dari Rekening Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana dalam pengaturannya mengalami perubahan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. "Oleh karena itu Saya meminta kepada seluruh Bupati dan Kepala Desa agar mulai tahun 2019 hal tersebut tidak terjadi lagi dan Saya harapkan agar seluruh Kepala Desa dapat mempedomani peraturan tersebut serta dapat diimplemetasikan secara baik dan tepat sehingga tidak dapat memunculkan masalah dikemudian hari", terang Sugianto Sabran.

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa bersama-sama dengan BPKP telah melakukan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk menyesuaikan semua perubahan pengelolaan keuangan desa. "Aplikasi ini beberapa waktu yang lalu telah dilaunching dan dibagikan ke semua desa melalui DPMD Kabupaten. Oleh karena itu Saya harapkan semua desa dapat menggunakannya secara maksimal dan apabila ada hal yang tidak dimengerti agar dapat dikonsultasikan kepada Satgas yang telah dibentuk", beber gubernur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Hamka menegaskan kepada 1.433 Kepala Desa se-Kalteng bahwa Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa se-Kalimantan Tengah Tahun 2019 bertujuan penyamakan persepsi, sinergitas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2014 terhadap Pemerintah Desa selaku aparatur penyelenggara pemerintahan desa.

Para Kepala Desa dalam Raker Pemerintahan Desa se-Kalteng tersebut juga menerima pembekalan tentang Program Pencegahan Penggunaan Narkoba Menuju Desa BERSINAR serta Program Pelestarian Adat dan Budaya Kalimantan Tengah.***

Pemprov Kalteng Sampaikan LKPJ T.A 2018 Kepada DPRD Kalteng

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Senin (25/03/2019).

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah agar mengetahui dan mendapatkan informasi langsung tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah dalam Tahun Anggaran 2018.

"LKPJ ini menjelaskan tentang arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan", beber gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Wagub Kalteng Habib H. Said Ismail dalam Sidang Paripurna Dewan tersebut.

LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 itu antara lain bidang Pemerintahan, Kesehatan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pertanian dan Perkebunan serta bidang Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Gubernur Sugianto Sabran dalam LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 juga menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah provinsi Kalimantan Tengah dengan realisasi Pendapatan Daerah 2018 sebesar Rp.4,6 triliun lebih atau mencapai 105,70 % dari target sebesar Rp.4,4 triliun lebih. "Hal ini bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2017, maka jumlah realisasinya secara nominal pencapaian target mengalami kenaikkan", terang gubernur.

Menurut gubernur Sugianto Sabran, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam urusan pemerintahan wajib tersebut memandang sangat penting untuk melakukan percepatan pembangunan bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan Kalteng Berkah yang berfokus pada peningkatan sarana dan parasana pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan pendidikan di daerah pedalaman dan terpencil serta peningkatan kualitas karakter peserta didik berbasis kearifan lokal dan pendukungan Beasiswa Pendidikan (BIDIK Misi Kalteng Berkah) kepada lulusan SMA/MA/SMK untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi.

Sementara di bidang pembangunan kesehatan disebutkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih menitik beratkan kepada aksesabilitas dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas dan jaringannya seperti Pustu, Polindes, Poskesdes dan Rumah Sakit. Selain itu, pemprov Kalteng juga berupaya melaksanakan Urusan Pilihan seperti bidang pertanian dan perkebunan dengan melaksanakan program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan meliputi penyediaan atau pemberian bantuan tanaman kopi sebanyak 174.000 batang yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota dan penyebaran 230.000 bibit kakao pada 5 Kabupaten.

Sedangkan di bidang perikanan direalisasikan dalam bentuk program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya produksi perikanan budidaya dengan pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba.

Untuk pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah, telah dilakukan penyelesaian batas daerah. "Dari 23 segmen batas antar Kabupaten/Kota telah terbit Permendagri sebanyak 15 segmen, 1 segmen telah disepakati oleh dua Bupati dan segera diusulkan untuk penyusunan Permendagri, 6 segmen telah ditegaskan dan diusulkan untuk diterbitkan Permendagri, sedangkan 1 segmen masih belum disepakati", ungkap gubernur Kalteng.***

Gub Kalteng : ASN Harus Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Tercela.

Palangka Raya – Biro PKP. Upacara Bendera Gabungan lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali diselenggarakan dengan Inspektur Upacara Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sapto Nugroho di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Senin (18/03/2019).

"Upacara Bendera Gabungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan setiap bulan janganlah dianggap sebagai formalitas belaka. Kegiatan ini memiliki nilai yang sangat luhur dalam membangkitkan semangat dan mengingatkan peran kita sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang mempunyai fungsi utama memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," tegas gubernur Kalteng dalam sambutannya disampaikan Plh Sekda Sapto Nugroho.

Paradigma kepemerintahan menempatkan birokrasi sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. Dengan demikian posisi aparatur pemerintah menjadi pelayan dan fasilitator yang baik terutama dalam upaya mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yakni melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat.

Sapto Nugroho mengingatkan agar ASN meningkatkan disiplin saat bertugas dan ASN perlu menyamakan persepsi bahwa semua ASN adalah abdi negara dan abdi masyarakat bukan bos sehingga bisa melayani masyarakat dengan prima. "Saya mengingatkan agar ASN bisa lebih meningkatkan disiplinnya saat bertugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mari kita tunjukkan prestasi yang cemerlang, dedikasi yang tinggi, loyalitas yang teruji dan tak tercela. Saya yakin dan percaya apabila seluruh ASN amanah, maka Kalteng akan Berkah," ujarnya gubernur.

ASN sebagai aparatur pemerintah harus mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga good goverment dan clean government dapat terwujud di lingkungan pemerintah Provinsi Kalteng. ASN juga dituntut menghindari sifat tercela yang dapat merugikan diri sendiri dan orang sekitar seperti mengkonsumsi Narkoba dan zat adiktif lainnya."Jauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba sebab narkoba akan menghancurkan masa depan bangsa. Saya sejak awal menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba di Kalteng. Saya minta sikap tegas dari aparatur penegak hukum agar para bandar narkoba yang tertangkap diberikan hukuman yang seberat-beratnya," tegas Gubernur Kalteng.***

Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I

Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (25/03) pada Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, agar mengetahui dan mendapatkan informasi langsung tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala daerah Tahun Anggaran 2018.

"LKPJ ini menjelaskan tentang arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan", kata Gubernur Kalteng.

Terdapat beberapa hal yang disorot dalam LKPJ Tahun Anggaran 2018 ini, antara lain bidang Pemerintahan, Kesehatan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pertanian/Perkebunan, serta Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Dalam urusan pemerintahan wajib, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang sangat penting percepatan pembangunan bidang pendidikan dalam mewujudkan Kalteng Berkah, dengan fokus pada peningkatan sarana dan parasana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan pelayanan pendidikan di daerah pedalaman dan terpencil, peningkatan karakter peserta didik berbasis kearifan local, dan pendukungan Beasiswa Pendidikan (BIDIK Misi Kalteng Berkah) kepada lulusan SMA/MA/SMK melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Untuk bidang pembangunan kesehatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih menitik beratkan kepada aksestabilitas dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di tingkat Puskesmas dan jaringannya (Pustu, Polindes, Poskesdes) maupun Rumah Sakit.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berupaya melaksanakan Urusan Pilihan seperti bidang pertanian/perkebunan dengan pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan berupa menyediakan atau memberikan bantuan berupa Kopi Siap Tanam sebanyak 174.000 batang tersebar di 7 Kabupaten/Kota dan bibit kakao sebanyak 230.000 bibit pada 5 Kabupaten. Serta bidang perikanan berupa program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya produksi perikanan budidaya dengan pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba.

Dalam rangka Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah telah dilakukan penyelesaian batas daerah. Dari 23 segmen batas antar Kabupaten/Kota telah terbit Permendagri sebanyak 15 segmen, 1 segmen telah disepakati oleh kedua Bupati dan segera diusulkan untuk penyusunan Permendagri, 6 segmen telah ditegaskan dan diusulkan untuk diterbitkan Permendagri dan 1 segmen masih belum disepakati.***

Sekda Kalteng : Kabupaten dan Kota Wajib Memiliki Lembaga Kelitbangan

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Setiap perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah wajib berdasarkan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi sehingga pengambilan keputusan strategis oleh para pemimpin daerah dilakukan secara tepat dan bermanfaat serta bermakna bagi kepentingan publik.

"Karena itu peran Bappedalitbang Provinsi Kalteng patut untuk dioptimalkan sejalan dengan UU RI Nomor : 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bertujuan memperkuat daya dukung IPTEK bagi keperluan percepatan pencapaian tujuan negara serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dan pergaulan internasional", tegas Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Rapat Kerja Kelitbangan se-Kalimantan Tengah Tahun 2019 di Palangka Raya, Selasa (05/03).

Keberhasilan pemerintah saat ini sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam merumuskan regulasi/kebijakan publik di tingkat pusat dan daerah. Terdapat 4 faktor utama yang mendorong pergeseran proses pengambilan keputusan tersebut meliputi perubahan teknologi, pengembangan dan penyebaran informasi dan teknologi komunikasi yang menghilangkan sekat jarak dan waktu sehingga apa yang dilakukan di suatu tempat dapat menyebar secara masif ke tempat lainnya pada durasi waktu yang sama.

Kemudian Faktor Globalisasi yang diintegrasikan dalam sistem ekonomi global sehingga perekonomian nasional dan daerah tergantung pada perekonomian global. Terjadinya pergeseran peran negara dalam pembangunan inklusif dimana deregulasi dan privatisasi harus dilakukan cepat, tepat, efektif dan efisien. "Hal ini menuntut peran ASN yang professional dan memiliki sistem pola pikir agar dapat menciptakan terobosan," tegas Sekda Kalteng tersebut.

Faktor lainnya adalah tuntutan masyarakat agar melakukan tata kelola kepemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, kinerja tinggi dan bermanfaat bagi publik. "Saya mewajibkan agar Kabupaten/Kota se-Kalteng memiliki lembaga penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan beban fungsi penunjang masing-masing dan dikelola secara profesional," beber Fahrizal Fitri.

Untuk mewujudkannya, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota perlu memiliki konsep Litbang sehingga terjadi kesatuan langkah yang saling mendukung dan mengintegrasikan agenda Kelitbangan antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota untuk menganalisis isu yang berkembang di dalam daerahnya masing-masing.

Terdapat 3 (tiga) isu strategis yang dibahas dalam forum tersebut yakni Penataaan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, SDM Litbang Daerah dan Rencana Aksi atau tindak lanjut produk litbang di daerah masing-masing. "Besar harapan Saya, ketiga hal tersebut diwujudkan dalam kesepakatan yang akhirnya direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan" tegas Sekda.

Raker Kelitbangan itu diikuti Kepala Bappedalitbang Kabupaten/Kota se-Kalteng, Kepala OPD di lingkup Pemprov Kalteng dan pejabat fungsional peneliti pada pemerintah kabupaten/kota dengan tema "Perencanaan Pembangunan Strategis Daerah Berbasis Kelitbangan dan Iptek", bertujuan mewujudkan lembaga Kelitbangan sebagai acuan dan arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Kalteng. ***

Sekda Kalteng : Pencapaian Target RPJMD Perlu Sinergitas Kabupaten/Kota dan Provinsi.

PALANGKA RAYA - BIRO PKP. Provinsi Kalimantan Tengah 4 tahun berturut-turut masuk dalam seleksi kategori 17 besar RKPD tahun 2019 dan dilakukan Penilaian Tahap II oleh Tim Penyelenggaraan Pemberiaan Penghargaan Pembangunan Daerah Kementerian Pembangunan Nasional/ Bappenas.

"Dengan ditambahkannya aspek capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dalam penilaian PPD tahun 2019, semakin menambah optimisme kami untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih baik. Hal itu mengingat capaian indikator makro pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan angka-angka yang menggembirakan dan penunjukkan peningkatan", jelas Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalteng tahun 2020 di Aula Bappeda Litbang Kalteng, Kamis (28/02).

Dikemukakan, sasaran dan target pembangunan provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 yang tertuang dalam RPJMD provinsi Kalteng tahun 2016-2021 itu meliputi Pertumbuhan Ekonomi 7 %, Laju Inflasi 4,1-4,2 %, Angka Kemiskinan 4,5 %, Tingkat Pengangguran Terbuka 4 %, Gini Ratio 0,287 dan Indeks Pembangunan Manusia 71,60. Target kinerja pembangunan provinsi tersebut merupakan agregasi dari target kinerja pembangunan Kabupaten dan Kota se-Kalteng. "Untuk mencapai target indikator-indikator tersebut diperlukan upaya dan kerja keras kita semua dan dukungan pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalteng melalui sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan pembangunan provinsi, kabupaten dan kota dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendaliannya", tegas Fahrizal Fitri.

Untuk itu lanjut Sekda Kalteng, penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan arahan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 melalui pendekatan Holistik-Tematik, Intergratif dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program.

Usai Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalteng 2020 dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2019. Pada FGD tersebut dilakukan Penilaian Tahap II oleh Tim Penilai Pusat dalam bentuk klarifikasi dan wawancara terhadap proses perencanaan.

Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 menjadi satu-satunya provinsi di Kalimantan yang masuk dalam seleksi kategori 17 besar RKPD 2019. Hal ini menjadi prestasi yang patut membanggakan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah karena untuk ke-empat kalinya provinsi Bumi Tambun Bungai berturut-turut masuk Penilaian Tahap II. "Saya berharap verifikasi lapangan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah provinsi Kalteng dalam rangka pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2019 dapat berjalan dengan baik. Sepenuhnya Saya serahkan kepada Tim Penilai untuk memulai proses verifikasi", terang Sekda Kalteng tersebut.***

Gub Kalteng : Guru Harus Mampu Membentuk Karakter Positif Dalam Diri Siswanya.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Siswa-siswi SMA, SMK dan SLB Tahun Pelajaran 2018/2019 akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer. Sehubungan dengan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berbasi Komputer tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pembekalan kepala Kepala SMA, SMK dan SLB se-Kalteng di Istana Isen Mulang Palangka Raya, Selasa (12/03).

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran ketika memberikan pembekalan kepada Kepala SMA, SMK dan SLB se-Kalteng tersebut menegaskan maju mundurnya sebuah bangsa akan sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia generasi mudanya karena generasi muda merupakan aset bangsa dan negara. “Karena itu negara hadir membangun generasi mudanya melalui peran pendidikan dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dalam semua aspek kehidupan”, tegas Sugianto Sabran.

Para guru juga harus mampu membentuk karakter positif pada diri siswanya dengan mendorong terciptanya 3 keseimbangan pada diri siswa yaitu Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual. “Guru dalam menilai prestasi siswanya tidak hanya menghargai prestasi akademik saja, tetapi juga menghargai prestasi, kejujuran, tanggung jawab, disiplin kerja dan kerja keras sehingga tidak ada satu anakpun yang merasa tidak memiliki prestasi dalam hidupnya”, tegas Sugianto Sabran.

Sugianto Sabran menjelaskan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah menyediakan dukungan biaya pendidikan melalui Program Bidik Misi Kalteng BERKAH yang hingga 2 tahun terakhir telah terlayanai sekitar 4.750 orang mahasiswa S1 dan akan terus ditingkatkan jumlah sasarannya hingga mencapai 10.000 mahasiswa. Dengan demikian dapat dipastikan IPM Kalteng akan meningkat sejalan dengan tingginya angka partisipasi belajar masyarakat usia 18-23 tahun. “ Saya berharap para kepala sekolah dapat melaksanakan 3 tugas pokok dengan baik yaitu tugas manajerial, tugas supervisi dan tugas kewirausahaan. Ciptakan suasana sekolah yang harmonis dan menyenangkan dan hindari konflik, serta ciptakan pemahaman yang sama kepada warga sekolah tentang wawasan wiyatamandala yang menegaskan bahwa sekolah sebagai lingkungan pendidikan, tempat untuk proses pembelajaran”, jelas Sugianto Sabran..

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Slamet Winaryo menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam bentuk penyiapan sarana dan prasarana sehingga provinsi Kalimantan Tengah sepenuhnya bisa menyelenggrakan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berbasis Komputer Tahun Pelajaran 2018-2019.

Selain itu menurut Slamet Winarno sejak pengalihan kewenangan pengelolaan SMA, SMK dan SLB dari Kabupaten dan Kota ke Provinsi beberapa tahun lalu dengan segala macam persoalan seperti kekurangan guru, guru-guru honor tidak bisa terbayar insentifnya, banyak sekolah yang tidak mempunyai buku, sarana dan prasarana labotarium terutama komputer serba minim. “Namun semua persoalan dan kendala tersebut saat ini bisa diatasi dengan baik atas perhatian dan dukungan pemerintah provinsi dan gubernur Kalimantan Tengah”, ungkap Slamet Winaryo.

Peserta Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berbasis Komputer Tahun Pelajaran (UNBK dan USBNBK) SMA, SMK dan SLB Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kalimantan Tengah berjumlah 28.624 siswa yang terdiri 18.308 siswa SMA, 10.304 siswa SMK dan 159 siswa SLB.

Dewan Adad Dayak Kalimantan Tengah juga turut memberikan pembekalan kepada Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB se-Kalteng dalam rangka pelaksanaan UNBK dan USBNBK 2018/2019 tersebut.

Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran meminta Dinas Pendidikan Kalteng dan pihak sekolah terus mengupayakan pengajaran budaya kearifan lokal kepada peserta didik seperti tari-tarian lokal. “Kearifan lokal, kultur sosial budaya, politik, moral dan ahklak perlu diajarkan di lingkungan sekolah derngan harapan anak didik bisa menghormati guru dan tidak lagi terjadi benturan antara murid dengan guru karena hal-hal sepele sehingga generasi muda bisa terarah pada jalan hidup yang benar”, terang Agustiar Sabran.***

Gelar Karya Kalteng 2019 Resmi Ditutup

Palangka Raya – Biro PKP. Gelar Karya Kalteng Tahun 2019 yang berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 16 – 20 Maret 2019 di Arena Pameran Temanggung Tilung Palangka Raya berakhir dan dittutup secara resmi oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy, Rabu malam (20/03).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng Jenta menyebutkan berdasarkan data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng tercatat nilai transaksi mencapai Rp.4,26 miliar rupiah lebih selama Gelar Karya Kalteng 2019 dan nilai transaksi tersebut sangat berpotensi bertambah.

Pelaksana Tugs (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalteng Jenta menyebutkan bahwa angka tersebut sangat berpotensi bertambah.

Sementara itu Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulis disampaikan Nurul Edy pada penutupan Gelar Karya Kalteng tersebut menjelaskan berbagai inovasi dan kreatifitas yang dihasilkan para pelaku industri kreatif memerlukan wadah untuk mengekspresikan karyanya. “Untuk itu perlu tempat pameran yang representatif sehingga memberi ruang dan kesempatan bagi para pelaku industri kreatif”, terang gubernur.

Gubernur juga menyampaikan terima kasihnya kepada Diskominfo yang standby meliput Gelar Karya tersebut sehingga bisa terexpose untuk masyarakat dan jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalteng yang bekerjasama dengan PT. Exco Mediatama Makmur Sejahtera selaku EO atas terselenggaranya event Gelar Karya Kalteng Tahun 2019.

Penyelenggaraan berbagai kegiatan Pameran Dagang Berskala Nasional maupun Internasional diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri lain yang terkait seperti Peningkatan Investasi, Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah untuk mendapatkan devisa serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperuntukkan kepada masyarakat Kalimantan Tengah menuju Kalteng Berkah.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahi Robbilalamin , Gelar Karya Kalteng 2019 malam ini Saya nyatakan resmi ditutup” ujar Nurul Edy.***

Gub Kalteng Serahkan LKPD Unaudited TA 2018 Kepada BPK Kalteng

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dan telah menyampaikannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Rabu (20/03/2019).

Penyusunan dan penyerahan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2018 itu diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Ade Iwan Ruswana.

Gubernur Sugianto Sabran mengharapkan kepada Bupati dan Walikota se-Kalteng agar benar-benar menjaga kualitas kinerja dan merapikan birokrasi sehingga 14 Kabupaten/Kota dan pemerintah provinsi Kalteng dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). “Jangan sampai lengah meskipun Perangkat Daerah dengan anggaran yang kecil tapi akuntansinya harus standar pemerintah karena dapat mempengaruhi Opini WTP”, jelas Sugianto Sabran.

Demi terciptanya pengelolaan anggaran yang baik maka audit BPK harus didukung. Untuk itu gubernur menginstruksikan Plh. Sekda Kalteng dan Kepala OPD lainnya agar mengarahkan jajaran dan staf bersikap kooperatif saat tim BPK RI melakukan pemeriksaan. “Semua harus kooperatif. Jangan sampai ada aparatur yang tidak kooperatif dan menghambat proses pemeriksaan. Kita harus manfaatkan moment ini untuk mengetahui kekurangan dan kesalahan yang masih sering terjadi demi perbaikan,” tegasnya Sugianto Sabran.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana menilai penyerahan LKPD Pemprov Kalteng yang dilakukan lebih awal merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan “Kami sangat mengapresiasi penyerahan LKPD ini karena diserahkan lebih awal. BPK RI Perwakilan Kalteng akan segera menindaklanjuti LKPD tersebut dengan menurunkan tim pemeriksa yang dimulai pada Kamis 23 Maret 2019,” ujar Ade.

Menurut Ade, kesalahan yang kerap kali ditemui berupa administratif, pencatatan, maupun kelemahan dari sisi pengendalian. Kesalahan tersebut akan terus dikoreksi dan diberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. “Pemprov Kalteng selama empat tahun berturut-turut sangat baik dan selalu meraih Opini WTP”, ungkap Ade Iwan Ruswana.

LKPD tersebut akan diperiksa oleh Tim Pemeriksa untuk diberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. “Kami berharap agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat berkoordinasi dengan baik kepada Tim Pemeriksa BPK untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan tersebut sehingga hasilnya dapat disampaikan kepada publik melalui Rapat Paripurna DPRD Kalteng bula Mei 2019”, beber Ade Iwan Ruswana. ***

Kalteng Perlu Teknologi Alternatif Pengolahan Lahan Tanpa Bakar

Palangka Raya – Biro PKP. Penyebab utama kebakaran lahan dan hutan disinyalir karena adanya praktek penyiapan lahan usaha tani dengan cara membakar sisa tanaman agar lahan cepat bersih untuk ditanami tanaman pangan dan perkebunan. Karena itu, sistem budidaya tanaman pertanian harus dilakukan dengan cara ramah lingkungan dan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No.15 tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah.

Pemerintah berupaya mencari pemecahan masalah yang sifatnya "win win solution" yakni amanat Peraturan Gubernur tersebut tetap dijalankan, tetapi petani juga bisa menjalankan kegiatan usaha tani dengan hasil yang memuaskan.

Salah satu upaya pemerintah melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyiapan Lahan Tanpa Bakar yang secara spesifik membahas teknologi alternatif pengelolaan lahan ramah lingkungan untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan di Palangka Raya, Senin (04/03)

Kepala Balai Penelitian Tanah Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian Bogor Husain mengatakan kegiatan penelitian penyiapan lahan tanpa bakar dimulai awal tahun 2018 yang difasilitasi Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan (TPHP) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penelitian penyiapan lahan tanpa bakar itu diawali dengan survei lahan/lokasi dan memutuskan tiga tempat dijadikan lokasi penelitian yaitu di Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut, Desa Sebuai Kecamatan Kumai dan di Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat. "Pada diskusi hari ini kami akan menyampaikan hasil kegiatan penelitian tahun 2018 dan juga membahas teknologi yang dapat diterapkan untuk penyiapan lahan yang ramah lingkungan dan mendiskusikan kebijakan langkah tindak lanjutnya", terang Husnain di depan peserta FGD tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Badan Litbang Pertanian beserta jajarannya dalam mencari solusi alternatif penyiapan lahan tanpa melakukan pembakaran. "Pemerintah daerah beserta Dinas/Instansi terkait akan secara aktif mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan demi tercapainya swasembada pangan di daerah ini", jelas Fahrizal Fitri.

Teknologi penyiapan lahan tanpa bakar yang dihasilkan nanti, perlu disebarluaskan kepada para pemangku kebijakan dan masyarakat petani melalui kegiatan diseminasi inovasi teknologi. Dengan demikian masyarakat luas akan memperoleh pemahaman yang mendalam terkait penyiapan lahan yang ramah lingkungan.

Untuk mendukung implementasi teknologi penyiapan lahan tanpa bakar tersebut pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Perguruan Tinggi, Pihak swasta dan masyarakat perlu bekerjasama untuk membuat aksi nyata di lapangan. "Teknologi alternatif ini memang harus dilakukan di Kalimantan Tengah, karena umumnya masyarakat kita masih menggunakan cara-cara yang tidak ramah lingkungan ketika membuka lahan untuk bertani", tegas Sekda Kalteng.

FGD dengan thema "Penyiapan Lahan Tanpa Bakar", itu dihadiri perwakilan Ditjen PSP Kementerian Pertanian, Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Bogor, Bappeda Litbang Kalteng, Dinas TPHP Provinsi/ Kab./Kota se-Kalteng, Akademisi, WWF Kalteng, Save Our Borneo Kalteng dan Peneliti/Penyuluh Badan Litbang Pertanian. ***

Wagub Kalteng Buka Gelar Karya Kalteng 2019

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Dalam pengembangan perdagangan, Ekonomi digital telah membuka peluang baru untuk menjembatani kepentingan produsen, konsumen dan pasar tanpa dibatasi ruang dan waktu dalam pengembangan perdagangan . Untuk itu kebijakan ekonomi digital dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.

"Saat ini komoditi ekspor kita masih berbasis pada sumber daya alam seperti kelapa sawit, batu bara, karet dan kayu olahan yang lama – lama sumber daya alam ini akan habis dan punah. Banyak peluang ekonomi di Kalimantan Tengah yang masih belum digarap secara maksimal terutama dari sisi kearifan lokal seperti industri kepariwisataan", ungkap Wagub Kalteng Habib H.Said Ismail ketika membuka Gelar Karya Kalimantan Tengah di lokasi Pameran Temanggung Tilung Palangka Raya, Jumat (16/03/2019).

Gelar Karya Kalimantan Tengah ini adalah salah satu wadah untuk mempromosikan daerah Kalimantan Tengah yang kaya akan budaya dan industri kepariwisataannya. "Saya berharap para pelaku usaha bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan terobosan – terobosan baru dan menjadi pionir terdepan dalam memanfaatkan teknologi ekonomi digital, karena Saya yakin pelaku usaha sudah banyak yang memanfaatkan teknologi untuk menjual dan memperkenalkan produk unggulannya", tegas Wagub.

Gelar Karya Kalimantan Tengah Tahun 2019 tersebut diprakarsai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang didukung oleh SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah. "Saya menyambut baik pameran Gelar Karya Kalimantan Tengah Tahun 2019 ini sebagai ajang gelar kreasi produk budaya dan unggulan kreatif inovatif yang dikemas melalui karya – karya yang bernilai budaya dan tradisi serta menampilkan beraneka karya dan inovasi hasil olahan rumahan dan industri", kata Wagub Kalteng

Wagub Kalteng Habib H.Said Ismail mengharapkan Gelar Karya Kalteng ini bisa menjadi event tahunan yang nantinya akan ditunggu – tunggu oleh masyarakat dalam upaya bersama meningkatkan ekonomi kerakyatan di Bumi Tambun Bungai.

"Ajang Gelar Karya Kalteng tersebut juga diharapkan dapat memotivasi dan memberikan semangat dalam melalukan pembenahan di seluruh sektor sesuai target pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan produk dalam negeri dan produk Kalimantan Tengah guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dimasa mendatang demi mewujudkan KALTENG BERKAH", tegas Sugianto Sabran. ***

Kalteng Februari 2019 Alami Deflasi 0,18 %

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2019 mengalami deflasi 0,18%, turun jika dibandingkan dengan kondisi Januari yang mengalami tekanan inflasi 0,42%. Demikian Rilis TPID Kalteng kepada Wartawan di Palangka Raya, Senin (04/03).

Capaian tersebut berada di atas rerata historis 3 tahun ke belakang dalam periode yang sama dan sejalan dengan nasional yang mengalami deflasi sebesar 0,08%. Komoditas penyumbang deflasi terbesar pada Februari 2019 di Kota Palangka Raya dan Sampit adalah komoditas kelompok Volatile Foods terutama Daging Ayam Ras.

Penurunan tekanan harga pada Februari 2019 disumbang oleh Kota Sampit, sedangkan kota Palangka Raya tercatat mengalami inflasi terbatas. Secara spesifik pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Palangka Raya tercatat inflasi 0,09% sedangkan kota Sampit tercatat deflasi 0,65%. Namun secara tahunan inflasi di Palangka Raya dan Sampit masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2018.

Siaran Pers TPID Kalteng juga menyebutkan sejak 1 Maret 2019 harga beberapa bahan pangan secara umum menunjukkan penurunan sebagai dampak normalisasi permintaan paska libur awal tahun. Harga daging ayam ras di Pasar Besar Palangka Raya Rp 35.000,-/kg dan di Pasar Kahayan Palangka Raya Rp 34.250,-/kg, sedangkan komoditas yang sama di Kota Sampit tercatat Rp 30.000,- di PPM dan Rp 30.000,- di Pasar Subuh Sampit.

Berdasarkan gambaran angka deflasi Februari 2019 tersebut sehingga Tim TPID Kalteng memperkirakan prospek inflasi periode Maret 2019 dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain pada kelompok Administered Prices karena adanya pergerakan harga komoditas minyak dunia yang mengalami penurunan serta kebijakan tarif, harga barang dan jasa yang diatur pemerintah relatif terbatas sedangkan harga tiket angkutan udara masih belum normal. Kelompok Core akan ditandai dengan adanya pergerakan harga komoditas emas dunia yang dapat mempengaruhi tingkat harga emas perhiasan dan potensi peningkatan tekanan harga menjelang musim kampanye.

Kemudian pada kelompok Volatile Foods dipengaruhi oleh adanya normalisasi permintaan paska libur awal tahun yang diperkirakan menahan laju inflasi, tingginya curah hujan akan berpotensi terganggunya proses panen terutama di sentra produksi nasional yang dapat berdampak pada kenaikan harga di Kalteng.

TPID Kalteng dalam Siaran Persnya juga menjelaskan kondisi terkini dan rencana aksi yang akan dilakukan Bulog Kalteng. Data dari pihak Bulog menyebutkan harga beras di Sampit mengalami sedikit kenaikan karena kenaikan harga di tingkat penggilingan. Namun operasi pasar telah ditingkatkan dan pada 1 Maret 2019 persediaan sembako dalam kondisi memadai, sementara stok daging ayam segar beku akan dilakukan penambahan guna mengantisipasi kenaikan permintaan di kemudian hari.

Demikian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalteng memperkirakan harga cabai akan mengalami penurunan pada Maret 2019 seiring dengan panen di sentra produksi nasional di Jawa dan harga bawang merah terpantau stabil terkendali.

Sementara itu pihak BMKG melaporkan curah hujan dalam kategori tinggi di kisaran 300-500 mm selama selama satu bulan sampai bulan Maret. Kondisi curah hujan yang tinggi tersebut akan menyulitkan nelayan melakukan penangkapan ikan sehingga berpengaruh pada harga ikan khususnya ikan Tongkol dan ikan Baung. Namun di bidang pangan dilaksanakan program gelar pangan murah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk mengantisipasi kenaikan harga. ***

Pemprov Kalteng Dukung Program BNF Untuk Konservasi Orangutan.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Hutan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting dan menjadi salah satu ekosistem yang menyimpan sumber daya alam kayu dan potensi non kayu lainnya yang dapat dimanfaatkan masyarakat melalui budi daya tanaman pertanian pada lahan hutan. Hutan sebagai fungsi ekosistem sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup jutaan flora dan fauna, peran penyeimbang lingkungan serta mencegah terjadinya pemanasan global.

Demikian juga hutan di Kalimantan Tengah merupakan salah satu aset yang sangat penting sebagai paru - paru dunia, memiliki tutupan lahan yang terdiri dari keanekaragaman kekayaan jenis dan tipe seperti Hutan Rawa Gambut (peat swamp forest), Hutan Kerangas (heath forest) dan Hutan Dipterokarpa (dipterocarp forest).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengungkapkan hal tersebut di depan peserta Sosialisasi Program Rungan yang diselenggarakan Borneo Nature Foundation (BNF) dengan tajuk "Upaya Bersama Untuk Pelestarian Bentang Alam Rungan Melalui Kegiatan Penelitian, Konservasi Orangutan dan Pemberdayaan Masyarakat" yang dihadiri instansi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Kalteng serta instansi non pemerintah di Palangka Raya, Selasa (05/03).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya terus mengupayakan peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati. "Salah satu sasaran program/indikator adalah usaha peningkatan persentase populasi 25 satwa terancam punah dengan prioritas sebesar 10% pada tahun 2019 dan di antara 25 spesies tersebut adalah Orangutan", terang Fahrizal Fitri. Ia juga menyebutkan pada tahun 2016 melalui Forum Orangutan Indonesia (FORINA) bersama KLHK menyepakati bahwa bentang alam Rungan dijadikan salah satu kawasan prioritas untuk penelitian dan konservasi Orangutan yang berada di luar kawasan lindung.

Fahrizal Fitri menegaskan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung program BNF tersebut. "Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung karena begitu banyak kajian berupa analisis tentang potensi ekosistem yang berada di kawasan bentang alam Rungan. BNF juga telah melakukan kerja sama dalam banyak hal dengan Universitas-Universitas yang ada di Palangka Raya", ujar Fahrizal Fitri seusai membuka Sosialisasi BNF tentang Program Rungan tersebut.

Borneo Nature Foundation (BNF) adalah organisasi non-pemerintah dan non-profit yang bekerja di bidang konservasi dan penelitian. BNF mendukung perlindungan dan pelestarian hutan yang tersisa di Kalimantan Tengah melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan setempat untuk melindungi habitat yang memiliki populasi Orangutan terbesar dan berada di luar kawasan yang dilindungi di Kalimantan Tengah.

Direktur Pelaksana BNF Bernat Ripoll Capilla menjelaskan bahwa konsep program tersebut dibentuk sejak tahun 2014 dan mulai dilaksanakan tahun 2015. Prinsip BNF harus mengintegrasikan semua aspek sosial-ekonomi, lingkungan dan prinsip hidup masyarakat. "Ini adalah satu lanskap yang paling penting di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. BNF sejak tahun 2015 berkomitmen dengan mengidentifikasikan potensi orangutan, tutup hutan, jasa lingkungan dan potensi masyarakat lainnya ke depan", ujar Bernat Ripoll Capilla. Ia juga mengungkapkan sekitar 3.000 individu orangutan di blok hutan Rungan. "Jadi blok hutan ini memiliki populasi paling tinggi di seluruh Kalimantan Tengah", ungkap Bernat.

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengharapkan kegiatan BNF melalui Program Rungan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penelitian dan konservasi, termasuk dalam mencegah dan mengurangi kerusakan habitat Orangutan serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat setempat juga terus diperhatikan. "Kami berharap kepada pihak BNF agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masa mendatang lebih terkoordinir dan dapat bermanfaat banyak secara ilmiah serta diperlukan keterbukaan data informasi untuk mendukung program pembangunan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah", tegasnya.

Fahrizal Fitri juga mengharapkan partisipasi dan kesadaran seluruh masyarakat lokal dan pendatang agar bersama - sama mendukung pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan demi tercapainya pelaksanaan pengelolaan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing – masing.***

Menteri KLH : Rimbawan Pantang Surut Menghadapi Tantangan

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya meminta jajaran Rimbawan pantang surut mengadapi tantangan di lapangan karena Rimbawan adalah sosok yang tangguh, kuat dan disiplin dalam kerja. “Semua capaian dan tantangan ke depan dapat diatasi dengan kerja keras para Rimbawan. Peringatan Hari Bhakti Rimbawan merupakan moment yang sangat baik untuk melakukan refleksi, menggali inspirasi, motivasi dan berbagai inovasi dalam kiprah kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan”, tegas Menteri KLH Siti Nurbaya dalam sambutan tertulis dibacakan Plh.Sekda Kalteng Sapto Nugroho pada Peringatan Hari Bhakti Rimbawan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 di Palangka Raya, Selasa (19/03/2019).

Menteri KLH Siti Nurbaya mengungkapkan saat ini sedang terjadi dan terus dilakukan langkah-langkah korektif di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang difokuskan pada upaya penataan ulang alokasi sumber daya hutan. “Penataan ulang alokasi sumber daya hutan tersebut antara lain dengan mengedepankan izin akses bagi masyarakat dengan hutan sosial, implementasi moratorium penerbitan izin baru di hutan alam primer dan gambut serta moratorium izin baru perkebunan sawit selama 3 tahun sejak November 2018”, terang Menteri KLH.

Selain itu juga dilakukan pengawasan pelaksanaan izin dan mencabut HPH/HTI yang tidak aktif, mendorong kerjasama hutan sosial, membangun konfigurasi bisnis baru dan mendorong kemudahan izin untuk kepentingan sarana/prasarana jalan, bendungan, energi, telekomunikasi, permukiman masyarakat/pengungsi.

Langkah korektif juga dilakukan dengan pengembangan instrumen kebijakan maupun operasional meliputi implementasi regulasi misalnya siaga darurat kebakaran dan lahan, instrumen pengukuran ISPU untuk analisis Karhutla selain hotspot, instrumen control Sistem Informasi Penata-Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH), sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) serta perijinan sebagai instrumen pengawasan dan regulasi sebagai sistem pembinaan kepada pemerintah daerah dan dunia usaha.

Menurut Menteri KLH Siti Nurbaya, sejak April 2018 Presiden Joko Widodo menegaskan untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi hutan secara besar-besaran mulai tahun 2019 yang diorientasikan kepada upaya penyelamatan danau, dam/waduk, permukiman dan menjaga keindahan alam sekaligus perluasan kesempatan kerja dan penyediaan kayu rakyat. “Reklamasi dan rehabilitasi lahan dilakukan di 15 Daerah Aliran Sungai (DAS), 15 danau, daerah hulu dan dam sebanyak 65 lokasi”, ungkap Siti Nurbaya.

Sebagai langkai korektif selanjutnya terdapat tiga pola penanaman antara lain penanaman oleh negara/pemeritah dilakukan melalui rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi ekosistem gambut, pemulihan wilayah akibat bencana longsor dan banjir serta pemulihan lokasi kebakaran hutan dan lahan..

Kemudian penanaman oleh korporasi dilakukan melalui industri seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Idustri (HTI), Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan Corporate Social Responsibility (CSR) sedangkan penanaman oleh masyarakat dilakukan melalui perhutanan sosial dan dinamika masyarakat atau lebih dikenal dengan sistem adopsi pohon. “Hari Bakti Rimbawan tahun 2019 yang mengusung tema HUTAN UNTUK KERSEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN SEHAT, sejalan dengan semangat dan misi keberadaan dan jati diri Rimbawan dalam perjuangan membangun kehutanan dan lingkungan”, jelas Menteri KLH Siti Nurbaya. ***

Pemprov Kalteng Kucurkan Program Kartu Kalteng Berkah (KKB).

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya mengatasi masalah dan menjawab tantangan di bidang kesehatan melalui berbagai program yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan misi gubernur Kalimantan Tengah dalam memantapkan sektor pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

"Masalah dan tantangan di bidang kesehatan selalu berkembang sesuai tuntutan pemenuhan hak setiap warga negara, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan pelayanan kesehtan yang bermutu dan terjangkau di wilayah perkotaan sampai ke pedalaman", beber gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutannya disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Endang Kusriatun di hadapan peserta Rapat Kerja Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 di Palangka Raya, Senin (25/03/2019).

Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan melalui program pembangunan Rumah Sakit Kelas A menggunakan Pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat Kalimantan Tengah dan RS Kelas A itu nanti diharapkan menjadi pusat rujukan regional Kalimantan.

Pemerintah provinsi Kalteng juga telah mengucurkan Program Kartu Kalteng Berkah (KKB) sebagai salah satu langkah percepatan cakupan kesehatan semesta selain upaya pemenuhan tenaga kesehatan dan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan. "Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program Kartu Kalteng Berkah (KKB) yang berintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 25 Miliar untuk premi jaminan kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah. Anggaran tersebut diperuntukan bagi 90.225 jiwa masyarakat kurang mampu sehingga diharapkan tahun 2019 terpenuhi 85 % sesuai amanat Presiden RI", tegas Sugianto Sabran.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan wajib berkolaborasi dengan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota dalam mengelola program-program prioritas seperti peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, eliminasi TB, penurunan stunting, peningkatan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) serta percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI-AKN) yang dilakukan melalui Program Indonesia Sehat dengan strategi Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dalam rangka percepatan menuju Indonesia Sehat.

Rapat Kerja Bidang Kesehatan yang dilaksanakan setiap tahun ini diikuti 200 peserta termasuk Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit se-Kalteng serta perwakilan Pergutuan Tinggi Negeri dan Swasta tersebut, bertujuan merumuskan program prioritas sesuai dengan pokok permasalahan yang terjadi dengan mengangkat tema "Kolaborasi Pusat dan Daerah Dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta".***

Gub Kalteng : Kedudukan Masyarakat Adat Harus Ditempatkan Pada Posisi Yang Tepat.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Sebagaimana diketahui, UUD'45 Pasal 18 B menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur Undang-Undang. "Pengakuan dan penghormatan itu hanya dapat terwujud jika kita sebagai elemen masyarakat adat Dayak khususnya, tanpa unsur paksaan terlebih dahulu mendukung, menghormati, menghargai dan menjaga kearifan adat yang menjadi bagian turun temurun dari kehidupan masyarakat adat Dayak", tegas gubenrur Kalteng Sugianto Sabran ketika membuka Rapat Kerja Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang Palangka Raya, Minggu (10/03). Raker DAD Kalteng 2019 ini diikuti Sekjen MADN Yakobus, Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran dan Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah.

Sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap lembaga adat tersebut, pemerintah provinsi Kalteng senantiasa berkomitmen untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat dengan segala kekayaan adat istiadat, budaya dan hukum adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak dahulu.

Keberpihakan pemerintah provinsi Kalteng terhadap Lembaga Adat tersebut diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. "Untuk itu kepada segenap pengurus DAD dan seluruh Damang Kepala Adat, Saya berpesan agar DAD beserta segenap elemennya tetap mengedepankan konsep NKRI sebagaimana telah Saudara ikrarkan ketika dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus DAD," tegas Gubernur.

Kedudukan masyarakat adat haruslah ditempatkan pada posisi yang tepat. "Kita perlu memberikan hak-hak tradisional adat kepada warganya tanpa harus melupakan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Masyarakat adat pun perlu terus menerus diberikan dorongan agar mereka mampu memainkan peran dalam pembangunan daerah dan nasional", beber Sugianto Sabran.

Dikemukakan, pemerintah Provinsi Kalteng dan DAD Kalteng telah menerima banyak pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak-hak tradisional masyarakat adat yang sebagian besar berhubungan dengan hak tanah adat masyarakat adat dan sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat.

Gubernur mengajak pemerintah Provinsi Kalteng dan DAD Kalteng untuk menelaah secara seksama dan mencari jalan keluarnya, sebab tidak semua pengaduan masyarakat mempunyai dasar dan alasan yang kuat meskipun sebagian mengandung kebenaran. "Membiarkan masalah itu, bukan mustahil akan menjadi sumber ketegangan dan konflik baru dalam masyarakat kita, apalagi posisi masyarakat hukum adat lemah di tengah kekuatan modal yang mengkesploitasi lahan dan sumberdaya alam", terang gubernur.

Karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menerus menyerukan kepada segenap jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota agar sungguh-sungguh dalam memperhatikan kepentingan hukum adat di daerah terutama dalam hal menyusun program pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Berkenaan dengan Pemilu mendatang, gubernur meminta jajaran DAD dan Damang Kepala Adat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah masing-masing. "Sosialisasikan bentuk kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kalteng yaitu menjunjung tinggi Filosofi Huma Betang. Kedepankan prinsip Belum Bahadat (hidup bertata karma dan beradat) dan ingat bahwa Bumi Tambun Bungai adalah Bumi Pancasila. Mari sukseskan Pemilu Damai 2019 dan jangan menjadi masyarakat golput serta stop hoaks dan ujaran kebencian", ujar Sugianto Sabran.***

Gub Kalteng : Pembangunan Kependudukan dan KB Harus Melibatkan Semua Pihak.

Palangka Raya – Biro PKP. Pembangunan daerah Kalimantan Tengah harus dititik-beratkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melalui program pembangunan yang terarah, terpadu dan kontinyu untuk meningkatkan daya saing daerah yang saat ini masih rendah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Karena itu Saya berharapa kepada semua pihak tidak hanya berbicara tentang kualitas atau pengendalian penduduk saja, tetapi juga berbicara tentang kualitas penduduk atau sumber daya manusia", tegas gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutannya disampaikan Kepala Biro Hukum Setda Kalteng Saring, SH pada Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 di Palangka Raya, Kamis (21/03).

Gubernur Sugianto Sabran menyatakan rasa optimisnya bahwa pembangunan keluarga dan masyarakat Kalimantan Tengah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, akan mampu meningkatkan kesadaran anggota keluarga untuk berupaya memperbaiki kualitas kehidupannya secara berkelanjutan dan berkesinambungan, memupuk usaha-usaha kemandirian keluarga dalam bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian serta keagamaan sehingga akan terbentuk keluarga-keluarga yang tegar dan tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan, tantangan dan persaingan yang semakin keras.

" P e m b a n g u n a n Kependudukan dan Program Berencana harus kita garap secara serius agar tidak terjadi ledakan penduduk (baby boom) di masa yang akan datang. Hal ini menjadi tanggung jawab kita semua termasuk pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta semua komponen masyarakat, LSM, Pihak Swasta, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan masyarakat itu sendiri", jelas gubernur.

Sementara itu Plt.Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat Dwi Listyawardani menjelaskan, Indonesia telah mengukir sejarah keberhasilan menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,31 % selama periode 1971-19780 menjadi 1,49 % dalam periode 2000-2010 dan 1,36 % pada periode 2010-2016. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini konsisten dengan penurunan angka kelahiran total dari 5,61 anak per wanita usia subur pada tahun 1971 menjadi 2,38 anak per wanita usia subur pada tahun 2018.

Penurunan angka kelahiran total telah merekayasa struktur umur penduduk untuk menciptakan peluang terjadinya bonus demografi yang dimulai sejak tahun 2012. Bonus demografi itu ditandai dengan rasio ketergantungan di bawah 50 per 100 penduduk usia produktif.

Diproyeksikan bonus demografi akan membuka jendelan peluang pada tahun 2020-2030. "Jika program keluarga berencana tetap menjadi prioritas pemerintah, maka periode bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan", ungkap Dwi Listyawardani di hadapan peserta Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019.

Seiring dengan keberhasilan pengendalian penduduk dan terwujudnya momentum bonus demografi tersebut maka proporsi penduduk lanjut usia juga mengalami peningkatan. "Untuk itu perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah yang tepat agar penduduk berusia lanjut LEBIH SEJAHTERA DI HARI TUA DAN TIDAK TUA SEBELUM KAYA", kata Dwi Listyawardani.

Salah satu upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah pengembangan Kampung KB. Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016 hingga sekarang tercatat 14.098 Kampung KB yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk Kalteng tercatat 287 Kampung KB dengan rincian 278 dikelola melalui dana APBN dan 9 Kampung KB dikelola melalui sumber dana APBD.

Kegiatan di Kampung KB dititik beratkan pada pemberian pelayanan dasar dan pemberdayaan keluarga bersama sektor terkait melalui sumber pendanaan yang beragam. "Inovasi dan gerakan Kampung KB ini merupakan langkah konkret BKKBN dalam upaya mempercepat capaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di daerah tertentu yang masih tertinggal dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Disamping itu juga diharapkan mampu membantu mengurangi angka kemiskinan dan penanggulangan gizi buruk melalui pendekatan keluarga", terang Dwi Listyawardani.***

Malam Hiburan
HUT TVRI KALTENG 24